
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2024



DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN



KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Tahun 2024 merupakan gambaran kegiatan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dalam mencapai tujuan/sasaran strategisnya di tahun 2024.

Penyusunan RKT Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan tahun 2024 ini dimaksudkan sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kegiatan yang akan dilakukan oleh Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi sepanjang tahun 2024. RKT ini akan menjadi acuan monitoring dan evaluasi kegiatan di Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan agar tetap fokus dan selaras dengan tujuan yang akan dicapai.

Masukan dan saran membangun dari semua pihak sangat diharapkan sebagai bahan penyempurnaan RKT Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan pada waktu yang akan datang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan RKT ini.



Jakarta, Desember 2023
Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

Anna Kurniati, SKM, MA, Ph.D

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab : Anna Kurniati, SKM, MA, Ph.D

Ketua : Irma Fitriyana Herman, S.Sos, MKM

Wakil Ketua : dr. Tia Mardiyah Arifin

Anggota :

1. Susanti, SE, MM
2. Dodi Badarianto, SKM., MKM
3. Rudian Arthianto, S.Kom, MM
4. Retno Ambarwati, SKM
5. Simanjuntak Agustina, SKM, M.K.M
6. Ifrani Yuan Khaulaharani, S.Kep
7. drg. Made Muryani Triningsih, MA
8. Bambang Suroso
9. Teguh Dwi R

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	1
1.3. Manfaat	1
1.4. Ruang Lingkup	2
1.5. Sasaran	2
1.6. Landasan Penyusunan	2
1.7. Sistematika Penulisan	3
Bab II. Kelembagaan dan Struktur Organisasi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan	4
2.1 Kelembagaan.....	4
2.2 Struktur Organisasi Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan.....	4
Bab III. Arah Kebijakan	6
3.1 Visi dan Misi.....	6
3.2 Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah.....	6
3.3 Rencana Kinerja Tahun 2024	9
3.4 Perjanjian Kinerja 2024	10
3.5 Kebutuhan Anggaran	10
Bab IV. Monitoring dan Evaluasi	11
4.1 Monitoring	11
4.2 Evaluasi	11
Bab V. Penutup	12
5.1 Kesimpulan	12
5.2 Penutup	12
Lampiran	
1. PAGU Tahun 2024	
2. RPD 2024	
3. RPK 2024	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Salah satu upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dilakukan dengan Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.

1.2. Tujuan

Tujuan disusun Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Tahun 2024 adalah.

1. Sebagai acuan dan arahan dalam dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas teknis pada program pembangunan kesehatan, mulai dari penyusunan kebijakan, rencana strategis, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi program/kegiatan pada tahun 2024.
2. Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan pada tahun 2024
3. Sebagai dokumen pendukung dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan pada tahun 2024

1.3. Manfaat

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan tahun 2020-2024 dan mengacu pada RPJMN tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI

Nomor 13 Tahun 2022 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 dan Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan tahun 2020-2024. RKT menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dalam kurun waktu 1 tahun kedepan yaitu sepanjang tahun 2024.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup RKT Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan meliputi kegiatan yang diusulkan pada RPJMN tahun 2020-2024 dan Renstra Kemenkes tahun 2020-2024. Kegiatan tersebut akan dijabarkan pada Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dan Rencana Aksi Kegiatan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan tahun 2020-2024.

1.5. Sasaran

Sasaran Buku RKT Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Tahun 2024 meliputi :

1. Internal Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan meliputi struktural, dan Pejabat Fungsional, dan Aparatur Sipil Negara lainnya
2. Lintas Program di Kementerian Kesehatan
3. Lintas Sektor terkait Pelaksanaan akuntabilitas.

1.6. Landasan Penyusunan

RKT Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan direncanakan, dianggarkan, dilaksanakan dan dievaluasi dengan landasan-landasan sebagai berikut :

1. Landasan Ideal Pancasila

Pancasila sebagai landasan ideal bagi masyarakat, menyebutkan adanya keseimbangan dan keselarasan baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, interaksi dengan masyarakat, interkasi dengan alam, interaksi dengan Negara dan bangsa lain maupun interaksi dengan Tuhan Yang Maha Esa

2. Landasan Konstitusi : UUD 1945

UUD 1945 menjadi dasar bagi pelaksanaan kehidupan bernegara dan berbangsa, termasuk implementasi hukum, peraturan, kebijakan dan nilai.

3. Landasan Operasional :

- a. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- e. Peraturan Presiden No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
- i. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 Tahun 2022 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024
- j. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025.

1.7. Sistematika Penulisan

Rencana Kinerja Tahunan Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

1. Kata Pengantar
2. Daftar Isi
3. BAB I. Pendahuluan
4. BAB II. Kelembagaan Dan Struktur Organisasi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
5. BAB III. Arah Kebijakan
6. BAB IV. Monitoring dan Evaluasi
7. BAB VI. Penutup
8. Lampiran

BAB 2

KELEMBAGAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN

2.1. Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 5 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendayagunaan tenaga kesehatan.

Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pendayagunaan tenaga kesehatan ;
- b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan tenaga kesehatan;
- c) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pendayagunaan tenaga kesehatan;
- d) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendayagunaan tenaga kesehatan;
- e) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- f) Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat.

2.2 Struktur Organisasi Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan terdiri atas:

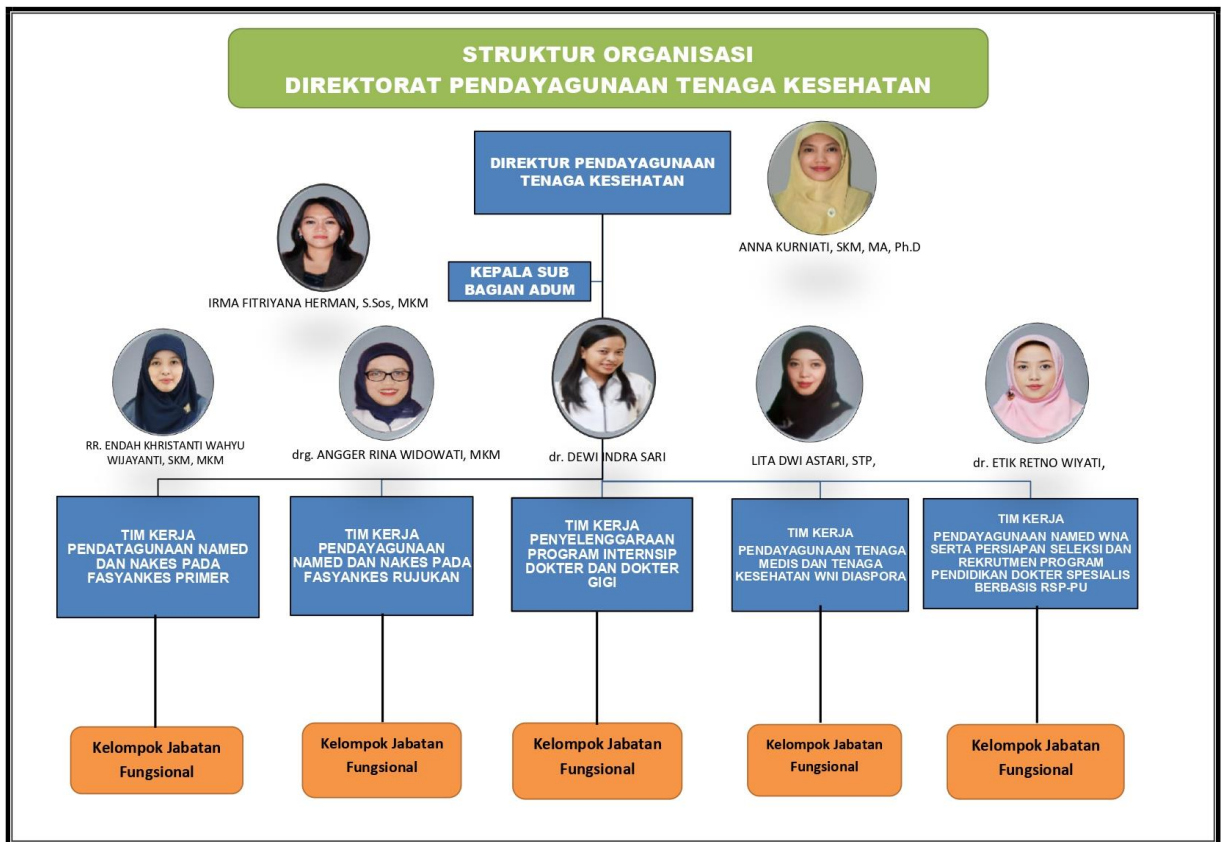
1. Subbagian Administrasi Umum

Subbagian Administrasi Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan anggaran, pembukuan dan inventarisasi barang milik negara, urusan sumber daya manusia, pengelolaan data dan sistem informasi, pemantauan, evaluasi, laporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Direktorat.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Kelompok Jabatan Fungsional pada tahun 2023 pada Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan meliputi Analis Kebijakan, Administrator Kesehatan, Analis Pengelola Keuangan APBN, Analis Kepegawaian/SDM Aparatur, Arsiparis, Pranata Keuangan APBN

Struktur Organisasi Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan



BAB 3

ARAH KEBIJAKAN

3.1. VISI dan MISI

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

3.2. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Sasaran strategis Kementerian Kesehatan tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 Tahun 2022 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024. Perubahan Renstra Kementerian Kesehatan dilakukan sebagai rumusan operasional atas gagasan dan konsep transformasi sistem kesehatan.

Substansi perubahan Renstra harus mencerminkan prinsip dan tujuan dari transformasi system kesehatan. Renstra Kementerian Kesehatan diharapkan dapat menggambarkan kapasitas dan bentuk respons Kementerian Kesehatan dalam menjawab disrupsi dan tantangan di masa yang akan datang. Perubahan Renstra Kementerian Kesehatan menjadi konsekuensi logis ketika sektor kesehatan akan bertransformasi. Perubahan tersebut mencakup 6 (enam) hal prinsip atau disebut sebagai pilar transformasi kesehatan yang juga merupakan bentuk penerjemahan reformasi sistem kesehatan nasional, yaitu

1. Transformasi Layanan Primer, mencakup upaya promotif dan preventif yang komprehensif, perluasan jenis antigen, imunisasi, penguatan kapasitas dan perluasan skrining di layanan primer dan peningkatan akses, SDM, obat dan kualitas layanan serta penguatan layanan laboratorium untuk deteksi penyakit atau faktor risiko yang berdampak pada masyarakat;
2. Transformasi Layanan Rujukan, yaitu dengan perbaikan mekanisme rujukan dan peningkatan akses dan mutu layanan rumah sakit, dan layanan laboratorium kesehatan masyarakat;
3. Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan dalam menghadapi Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah penyakit/kedaruratan kesehatan masyarakat, melalui kemandirian kefarmasian dan alat kesehatan, penguatan surveilans yang adekuat berbasis

komunitas dan laboratorium, serta penguatan sistem penanganan bencana dan kedaruratan kesehatan;

4. Transformasi Pembiayaan Kesehatan, untuk menjamin pembiayaan yang selalu tersedia dan transparan, efektif dan efisien, serta berkeadilan;
5. Transformasi SDM Kesehatan, dalam rangka menjamin ketersediaan dan pemerataan jumlah, jenis, dan kapasitas SDM kesehatan;
6. Transformasi Teknologi Kesehatan, yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan bioteknologi di sektor kesehatan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 Tahun 2022 yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024, Indikator Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM Kesehatan yang berkualitas 65% Persentase faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar, 45% Persentase fasilitas kesehatan dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya, dan 25 % persentase fasilitas kesehatan dengan SDM kesehatan tersertifikasi.

Dalam rangka mendukung capaian indikator sasaran hasil tersebut, maka disusun Indikator Kinerja Program Ditjennakes seperti terlihat pada tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 3.1
Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal tenaga Kesehatan Tahun 2022-2024

Indikator	TARGET		
	2022	2023	2024
Persentase puskesmas dengan dokter	100	100	100
Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	65	71	83
Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya	80	85	90
Persentase Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang terakreditasi	25	60	100

Untuk mendukung capaian indikator kinerja program tersebut pada Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan diturunkan menjadi kegiatan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan, yang kemudian diturunkan menjadi indikator kinerja kegiatan. Adapun sasaran kegiatan dan indikator Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan terdapat dalam Permenkes 13 tahun 2022.

Capaian Kinerja Kegiatan tahun 2023 (per 31 Desember) sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Tahun 2023

No.	IKK	Target	Capaian	%
1	Persentase puskesmas yang sudah memiliki minimal satu dokter	100%	96,84%	96,84%
2	Persentase puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi	50%	72,75%	144,50%
3	Persentase puskesmas yang memiliki SDM Kesehatan sesuai standar	80%	56,22%	70,28%
4	Persentase dokter spesialis lulusan luar negeri yang kompeten mengikuti program adaptasi	100%	100%	100%
5	Jumlah lulusan dokter spesialis yang didayagunakan	600 orang	586 orang	97,67%
6	Persentase dokter internsip yang kompeten dalam melaksanakan program prioritas Kementerian Kesehatan di Fasyankes	98%	99,02%	101,04%

Capaian IKK belum seluruhnya dapat mencapai 100%, adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator, sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masing-masing indikator.

Hasil pengukuran kinerja tersebut ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/kegiatan yang direncanakan dapat tercapai sesuai misi organisasi dalam rangka target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.3
Target Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Tahun 2024

No.	IKK	Target
1	Persentase puskesmas yang sudah memiliki minimal satu dokter	100%
2	Persentase puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi	60%
3	Persentase puskesmas yang memiliki SDM Kesehatan sesuai standar	90%
4	Persentase dokter spesialis lulusan luar negeri yang kompeten mengikuti program adaptasi	100%
5	Jumlah lulusan dokter spesialis yang didayagunakan	700 orang
6	Persentase dokter internsip yang kompeten dalam melaksanakan program prioritas Kementerian Kesehatan di Fasyankes	98%

Untuk mencapai target IKK 2024 tersebut Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan telah menetapkan Rincian Output dan targetnya sebagai berikut

Tabel 3.4
Rincian Output (RO) Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
Tahun 2024

Kode	Rincian Output	Target
Pendayagunaan Tenaga Kesehatan		
6812.ABG.001	Kebijakan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang/Pendukung WNA dan WNI LLN (SDM-22)	2 Rekomendasi Kebijakan
6812.BAA.001	Pendayagunaan SDM Indonesia Ke Luar Negeri (SDM-22)	720 Orang
6812.BAA.002	Pendayagunaan Sdmk Warga Negara Asing (SDM-22)	75 Orang
6812.BAA.003	Penugasan Khusus Bagi Calon Dokter Spesialis (Residen) (SDM-22)	50 Orang
6812.BAA.004	Pendayagunaan Residen Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU)	72 Orang
6812.FBA.001	Fasilitasi Dan Pembinaan Daerah	1 Daerah
6812.PBG.001	Penyusunan Kebijakan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Di Puskesmas (SDM-22)	1 Rekomendasi Kebijakan
6812.QAA.001	Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim (SDM-22)	1.200 Orang
6812.QAA.002	Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Di Wilayah Papua (SDM-22)	200 Orang
6812.QAA.003	Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Individu (SDM-22)	4.000 Orang
6812.QAA.004	Pendayagunaan Dokter Spesialis (SDM-22)	660 Orang
6812.QAA.005	Pendayagunaan Dokter Spesialis Di Wilayah Papua (SDM-22)	40 Orang
6812.QAA.007	Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Wni Lulusan Luar Negeri (SDM-22)	72 Orang
Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan		
5234.DBA.001	Internsip Dokter (SDM-22)	12.000 Orang
5234.DBA.002	Internsip Dokter Gigi (SDM-22)	1.200 Orang

3.3. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Salah satu bagian dari perencanaan yang penting dalam instansi pemerintah adalah rencana kinerja tahunan. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024 memuat rincian target Rencana Aksi Kegiatan beserta kegiatan dan anggaran di tahun 2024.

RKT Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan tahun 2024 yang diimplementasikan dalam dokumen Renja-KL 2024 dan selanjutnya tertuang di dalam

dokumen DIPA/RKA-K/L Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Tahun 2024. (terlampir)

3.4. PERJANJIAN KINERJA 2024

Sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah khususnya perencanaan kinerja, Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan telah membuat Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Dirjen Tenaga Kesehatan tahun 2024. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja adalah penjabaran dari rencana kinerja tahunan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan tahun anggaran 2024 seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Perjanjian Kinerja Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan
Tahun Anggaran 2024

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Program : Pelayanan Kesehatan dan JKN Kegiatan: Pendayagunaan Tenaga Kesehatan	Persentase puskesmas yang sudah memiliki minimal satu dokter	100%
		Persentase puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal satu dokter gigi	60%
		Persentase puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar	90%
		Persentase dokter spesialis lulusan luar negeri yang kompeten mengikuti program adaptasi	100%
		Jumlah lulusan dokter spesialis yang didayagunakan	700 orang
2	Program : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Kegiatan: Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan	Persentase dokter internsip yang kompeten dalam melaksanakan program prioritas Kementerian Kesehatan di Fasyankes	98%

3.5. KEBUTUHAN ANGGARAN.

Rencana Kegiatan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan bersumber APBN, yang anggarannya terdiri atas 2 (dua) program yaitu :

1. Program Pelayanan Kesehatan dan JKN
 2. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi
- (rincian anggaran terlampir)

BAB 4

MONITORING DAN EVALUASI

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Tahun 2024 ini disusun untuk memberikan panduan dan acuan bagi Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dalam dukungan manajemen dan pelaksanaan kegiatan.

Kegiatan yang dilaksanakan perlu dilakukan monitoring untuk menjamin keselarasan kegiatan dan tercapainya target. Pelaksanaan monitoring dilakukan per triwulan untuk kemudian dilakukan evaluasi dan ditentukan tindak lanjutnya.

4.1. Monitoring

Monitoring adalah kegiatan pemantauan dan pengamatan yang berlangsung selama kegiatan berjalan untuk memastikan dan mengendalikan keselarasan pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan pencapaian target.

Selain pencapaian indikator dan sasaran, monitoring dapat dilakukan baik terhadap kualitas kegiatan maupun pemanfaatan dana yang telah dianggarkan. Untuk mempermudah melakukan monitoring tersebut diharuskan membuat laporan (progress report) dari masing-masing program yang telah dilakukan ataupun program yang berjalan.

4.2. Evaluasi

Evaluasi adalah upaya menilai kualitas program dan dampak dari pelaksanaan program. Evaluasi dilakukan berkala sehingga dapat ditindaklanjuti dalam penentuan kebijakan selanjutnya. Evaluasi terhadap pelaksanaan RKT dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan tahun 2024 ini merupakan dokumen acuan dalam penyusunan kegiatan pertahun di Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan agar tetap selaras dengan tujuan-tujuan organisasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan dokumen ini juga dapat dijadikan acuan didalam melaksanakan monitoring dan evaluasi. Evaluasi terkait dokumen RKT ini dapat dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dokumen diatasnya

5.2. Penutup

Demikian telah kami susun dokumen Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Tahun 2024. Masukan dan saran untuk perbaikan atau penyempurnaan RKT ini sangat kami harapkan. Untuk masukan dan saran dapat menghubungi Sub Bagian Administrasi Umum Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan.

Lampiran

1. PAGU Tahun 2024
2. RPD 2024
3. RPK 2024

KODE	PROGRAM/KEGIATAN /KRO/RO/KOMPONEN*	PAGU TA 2024	
		Target	Anggaran (Rp ribu)
024.DG	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN		110.627.816
6812	Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan		110.627.816
6812.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	2 Rekomendasi Kebijakan	307.550
6812.ABG.001	Kebijakan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang/Pendukung WNA dan WNI LLN	2 Rekomendasi Kebijakan	307.550
6812.ABG.001.051	Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Pendayagunaan TKWNA	1 dokumen	172.600
6812.ABG.001.052	Penyusunan Daftar Jabatan yang dapat Diduduki Tenaga Kerja Asing untuk Kategori Kesehatan	1 dokumen	134.950
6812.BAA	Pelayanan publik kepada masyarakat	917 Orang	8.503.796
6812.BAA.001	Pendayagunaan SDMK Indonesia Ke Luar Negeri	720 Orang	3.092.660
6812.BAA.001.051	Penyusunan Kebijakan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan ke Luar Negeri	1 dokumen	295.400
6812.BAA.001.054	Fasilitasi Implementasi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan ke LN	720 Orang	2.488.610
6812.BAA.001.055	Pemanfaatan returnee dalam sharing experience peningkatan karir ke LN kepada lulusan Poltekkes	1 dokumen	249.500
6812.BAA.001.058	WHO Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnels	1 dokumen	59.150
6812.BAA.002	Pendayagunaan SDMK Warga Negara Asing	75 Orang	1.548.410
6912.BAA.002.051	Advokasi Pendayagunaan SDMK WNA di wilayah KEK	1 dokumen	233.950
6912.BAA.002.052	Pendampingan Teknis Pendayagunaan SDMK WNA sesuai area kegiatan	75 orang	713.560
6912.BAA.002.053	Refleksi Implementasi Pendayagunaan TK WNA dan WNI LLN	1 dokumen	600.900
6812.BAA.003	Penugasan Khusus bagi Calon Dokter Spesialis (Residen)	50 Orang	679.140
6812.BAA.003.053	Penempatan	50 orang	339.570
6812.BAA.003.054	Pemulangan	50 orang	339.570
6812.BAA.004	Pendayagunaan Residen Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU)	72 Orang	3.183.586
6812.BAA.004.051	Rekrutmen dan Seleksi	72 Orang	3.183.586
6812.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Daerah	1 Daerah (Provinsi/Kab/Kota)	1.350.800
6812.FBA.001	Fasilitasi dan Pembinaan Wilayah	1 Daerah (Provinsi/Kab/Kota)	1.350.800
6812.FBA.001.051	Fasilitasi dan Pembinaan Wilayah	1 Daerah (Provinsi/Kab/Kota)	1.350.800
6812.PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan	1 Rekomendasi Kebijakan	133.580
6812.PBG.001	Penyusunan Kebijakan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan (SDM)	1 Rekomendasi Kebijakan	133.580
6812.PBG.001.051	Penyusunan Kebijakan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan	1 dokumen	133.580
6812.QAA	Pelayanan publik kepada masyarakat	7172 Orang	100.332.090
6812.QAA.001	Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim (SDM)	1200 orang	26.756.895
6812.QAA.001.051	Dukungan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim	1 dokumen	6.368.095
6812.QAA.001.052	Rekrutmen dan Seleksi	654 orang	2.918.775
6812.QAA.001.053	Pra Penempatan dan Pelaksanaan Penempatan	190 orang	13.097.275
6812.QAA.001.054	Pemulangan Tim	1010 orang	4.171.950
6812.QAA.001.055	Pendampingan Teknis Penugasan Khusus Secara Tim	2 lokus	200.800
6812.QAA.002	Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di wilayah Papua (SDM)	200 Orang	4.473.640
6812.QAA.002.051	Dukungan Kegiatan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di wilayah Papua	1 dokumen	1.753.748
6812.QAA.002.052	Pelaksanaan Penempatan Tugsus Tenaga Kesehatan secara Tim	28 orang	494.360
6812.QAA.002.053	Pelaksanaan Penempatan Tugsus Tenaga Kesehatan Individu	72 orang	1.119.560
6812.QAA.002.054	Pemulangan Tugsus Tenaga Kesehatan secara Tim	28 orang	297.520

KODE	PROGRAM/KEGIATAN /KRO/RO/KOMPONEN*	PAGU TA 2024	
		Target	Anggaran (Rp ribu)
6812.QAA.002.055	Pemulangan Tugus Tenaga Kesehatan Individu	72 orang	636.480
6812.QAA.002.056	Pendampingan Teknis Penugasan Khusus di wilayah Papua	2 lokus	171.972
6812.QAA.003	Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Individu (SDM)	4000 Orang	30.924.363
6812.QAA.003.051	Dukungan Kegiatan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Individu	1 dokumen	202.050
6812.QAA.003.052	Rekrutmen dan Seleksi	3336 orang	2.904.550
6812.QAA.003.053	Pelaksanaan Penempatan	1596 orang	18.391.213
6812.QAA.003.054	Pemulangan	2404 orang	9.187.800
6812.QAA.003.055	Pendampingan Teknis Penugasan Khusus Secara Individu	5 lokus	238.750
6812.QAA.004	Pendayagunaan Dokter Spesialis (SDM)	660 Orang	10.354.510
6812.QAA.004.051	Penyelenggaraan Pra Penempatan PGDS	1 dokumen	507.800
6812.QAA.004.052	Pelaksanaan PGDS	12 Bulan	9.714.230
6812.QAA.004.053	Pendampingan Teknis Pelaksanaan Pendayagunaan Dokter Spesialis	6 RS	132.480
6812.QAA.005	Pendayagunaan Dokter Spesialis di Wilayah Papua (SDM)	40 orang	1.036.712
6812.QAA.005.051	Penyiapan Lokasi Penempatan PGDS	5 RS	674.560
6812.QAA.005.052	Pelaksanaan penempatan (pemberangkatan dan pemulangan)	40 orang	362.152
6812.QAA.007	Pendayagunaan Tenaga Kesehatan WNI Lulusan Luar Negeri (SDM)	72 Orang	26.785.970
6812.QAA.007.051	Dukungan Program Adaptasi Dokter Spesialis WNI LLN	1 dokumen	1.807.240
6812.QAA.007.052	Pengelolaan Program Adaptasi Dokter Spesialis WNI LLN	72 orang	24.476.200
6812.QAA.007.053	Pendampingan Teknis Pelaksanaan Program Adaptasi Dokter Spesialis WNI LLN	1 dokumen	502.530
5234	Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan	13200 Orang	684.735.158
5234.DBA	Pendidikan Tinggi	13200 Orang	684.735.158
5234.DBA.001	Internsip Dokter	12000 Orang	629.092.086
5234.DBA.001.051	Penyusunan Kebijakan PIDI	1 dokumen	22.800
5234.DBA.001.052	Penyiapan Wahana	1 dokumen	165.600
5234.DBA.001.053	Pelatihan Dokter Pendamping	1 dokumen	2.735.700
5234.DBA.001.054	Pembekalan Peserta Internsip	12000 Orang	16.481.540
5234.DBA.001.055	Pelaksanaan PIDI	12000 Orang	603.674.360
5234.DBA.001.056	Pendampingan Implementasi Pelaksanaan PIDI	1 dokumen	27.000
5234.DBA.001.057	Workshop program internsip/ raker KIKI	1 dokumen	42.900
5234.DBA.001.058	Dukungan KIKI dalam pelaksanaan PIDI	1 dokumen	4.126.500
5234.DBA.001.059	Dukungan Tata Laksana Sekretariat PIDI	1 dokumen	1.815.686
5234.DBA.002	Internsip Dokter Gigi	1200 Orang	55.643.072
5234.DBA.002.051	Penyusunan Kebijakan Internsip Dokter Gigi	1 dokumen	16.800
5234.DBA.002.052	Penilaian Wahana	1 dokumen	428.800
5234.DBA.002.053	Pelatihan Dokter Gigi Pendamping Internsip	1 dokumen	2.787.550
5234.DBA.002.054	Pembekalan Peserta Dokter Gigi Internsip	1200 Orang	6.421.400
5234.DBA.002.055	Pelaksanaan Internsip Dokter Gigi	1200 Orang	45.065.986
5234.DBA.002.056	Pendampingan Implementasi Pelaksanaan Internsip Dokter Gigi	1 dokumen	269.900
5234.DBA.002.057	Dukungan KIKI pada Pelaksanaan Internsip Dokter Gigi	1 dokumen	193.600
5234.DBA.002.058	Dukungan Tata Laksana Sekretariat PIDGI	1 dokumen	459.036
Total			795.362.974

DALAM 000

RO/ Komponen	Target RO	Alokasi 2024	RPD 2024													
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah	
Timja 1		62.288.478	-	5.266.718	5.031.608	6.701.050	3.711.375	5.891.470	5.605.515	2.060.613	4.851.160	2.839.225	12.450.576	7.879.170	62.288.478	
6812.PBG.001	Penyusunan Kebijakan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Di Puskesmas (SDM-22)	1 Rekomendasi Kebijakan	133.580	-	-	75.600	-	4.300	-	-	-	-	-	53.680	-	133.580
051	Penyusunan Kebijakan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan di Puskesmas		133.580	-	-	75.600	-	4.300	-	-	-	-	-	53.680	-	133.580
6812.QAA.001	Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim (SDM-22)	1200 Orang	26.756.895	-	971.688	710.638	1.570.188	780.113	3.985.288	465.225	1.751.800	3.013.600	135.863	7.070.075	6.302.420	26.756.895
051	Dukungan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Tim		6.368.095	-	-	50.863	39.950	50.863	-	107.475	50.863	-	50.863	-	6.017.220	6.368.095
052	Rekrutmen dan Seleksi		2.918.775	-	-	659.775	357.750	729.250	-	357.750	729.250	-	85.000	-	-	2.918.775
053	Pra Penempatan dan Pelaksanaan Penempatan		13.097.275	-	-	-	-	-	3.013.600	-	-	3.013.600	-	7.070.075	-	13.097.275
054	Pemulangan Tim		4.171.950	-	971.688	-	971.688	-	971.688	-	971.688	-	-	-	285.200	4.171.950
055	Pendampingan Teknis Penugasan Khusus Secara Tim		200.800	-	-	-	200.800	-	-	-	-	-	-	-	-	200.800
6812.QAA.002	Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Di Wilayah Papua (SDM 22)	200 Orang	4.473.640	-	-	-	527.020	469.492	1.513.920	845.260	-	-	318.240	699.708	100.000	4.473.640
051	Dukungan Kegiatan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di wilayah Papua		1.753.748	-	-	-	527.020	-	-	527.020	-	-	-	699.708	-	1.753.748
052	Pelaksanaan Penempatan Tugsus Tenaga Kesehatan secara Tim		494.360	-	-	-	-	-	454.360	-	-	-	-	-	40.000	494.360
053	Pelaksanaan Penempatan Tugsus Tenaga Kesehatan Individu		1.119.560	-	-	-	-	-	1.059.560	-	-	-	-	-	60.000	1.119.560
054	Pemulangan Tugsus Tenaga Kesehatan secara Tim		297.520	-	-	-	-	297.520	-	-	-	-	-	-	-	297.520
055	Pemulangan Tugsus Tenaga Kesehatan Individu		636.480	-	-	-	-	-	-	318.240	-	-	318.240	-	-	636.480
056	Pendampingan Teknis Penugasan Khusus di wilayah Papua		171.972	-	-	-	-	171.972	-	-	-	-	-	-	-	171.972
6812.QAA.003	Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Individu (SDM 22)	4000 Orang	30.924.363	-	4.295.030	4.245.370	4.603.843	2.457.470	392.263	4.295.030	308.813	1.837.560	2.385.123	4.627.113	1.476.750	30.924.363
051	Dukungan Kegiatan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Secara Individu		202.050	-	-	-	29.650	-	113.100	-	29.650	-	29.650	-	-	202.050
052	Rekrutmen dan Seleksi		2.904.550	-	-	1.787.900	279.163	-	279.163	-	279.163	-	279.163	-	-	2.904.550
053	Pelaksanaan Penempatan		18.391.213	-	2.457.470	2.457.470	2.457.470	2.457.470	-	2.457.470	-	-	-	4.627.113	1.476.750	18.391.213
054	Pemulangan		9.187.800	-	1.837.560	-	1.837.560	-	-	1.837.560	-	1.837.560	1.837.560	-	-	9.187.800
055	Pendampingan Teknis Penugasan Khusus secara Individu		238.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238.750	-	-	238.750
Timja 2		12.070.362	580.179	1.264.505	830.208	830.208	1.261.585	1.126.673	1.286.585	1.151.673	1.286.585	1.151.673	1.270.305	30.179	12.070.362	
6812.BAA.003	Penugasan Khusus Bagi Calon Dokter Spesialis (Residen) (SDM-22)	50 Orang	679.140	-	67.914	67.914	67.914	67.914	67.914	67.914	67.914	67.914	67.914	67.914	-	679.140
052	Penempatan		339.570	-	33.957	33.957	33.957	33.957	33.957	33.957	33.957	33.957	33.957	33.957	-	339.570
054	Pemulangan		339.570	-	33.957	33.957	33.957	33.957	33.957	33.957	33.957	33.957	33.957	33.957	-	339.570
6812.QAA.004	Pendayagunaan Dokter Spesialis (SDM 22)	660 Orang	10.354.510	550.000	1.031.500	732.115	732.115	1.028.580	1.028.580	1.053.580	1.053.580	1.053.580	1.053.580	1.037.300	-	10.354.510
051	Penyelenggaraan Pra Penempatan PGDS		507.800	50.000	56.500	-	-	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	62.300	-	507.800
052	Pelaksanaan Pra PGDS		9.714.230	500.000	975.000	732.115	732.115	950.000	950.000	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000	-	9.714.230
053	Pendampingan Teknis Pelaksanaan Pendayagunaan Dokter Spesialis		132.480	-	-	-	-	22.080	22.080	22.080	22.080	22.080	22.080	-	-	132.480
6812.QAA.005	Pendayagunaan Dokter Spesialis Di Wilayah Papua (SDM-22)	40 Orang	1.036.712	30.179	165.091	30.179	30.179	165.091	30.179	165.091	30.179	165.091	30.179	165.091	30.179	1.036.712
051	Penyiapan Lokasi Penempatan PGDS		674.560	-	134.912	-	-	134.912	134.912	134.912	134.912	-	134.912	-	-	674.560
052	Pelaksanaan (pemberangkatan dan pemulangan)		362.152	30.179	30.179	30.179	30.179	30.179	30.179	30.179	30.179	30.179	30.179	30.179	30.179	362.152

RO/ Komponen	Target RO	Alokasi 2024	RPD 2024												Jumlah	
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des		
Timja 3		684.735.158	-	68.651.943	57.683.083	57.877.533	68.625.543	59.083.133	59.195.258	68.625.543	59.148.533	59.589.058	68.668.443	57.587.083	684.735.158	
5234.DBA.001	Internsip Dokter (SDM-22)	12000 Orang	629.092.086	-	62.207.319	53.932.809	53.918.459	62.192.119	55.203.509	53.842.409	62.192.119	55.210.259	54.315.659	62.235.019	53.842.409	629.092.086
051	Penyusunan kebijakan PIDJ		22.800	-	15.200	7.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.800
052	Penyiapan wahana		165.600	-	-	82.800	82.800	-	-	-	-	-	-	-	-	165.600
053	Pelatihan dokter pendamping		2.735.700	-	-	-	-	-	1.367.850	-	-	1.367.850	-	-	-	2.735.700
054	Pembekalan peserta intersnip		16.481.540	-	4.120.385	-	-	4.120.385	-	-	4.120.385	-	-	4.120.385	-	16.481.540
055	Pelaksanaan PIDJ		603.674.360	-	57.575.171	53.339.096	53.339.096	57.575.171	53.339.096	53.339.096	57.575.171	53.339.096	53.339.096	57.575.171	53.339.096	603.674.360
056	Pendampingan Implementasi Pelaksanaan PIDJ		27.000	-	-	6.750	-	-	-	6.750	-	6.750	-	-	6.750	27.000
057	Workshop program intersnip dan raker KIKI		42.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.900	-	42.900
058	Dukungan KIKI dalam pelaksanaan PIDJ		4.126.500	-	331.500	331.500	331.500	331.500	331.500	331.500	331.500	331.500	811.500	331.500	331.500	4.126.500
059	Dukungan Tata Laksana Sekretariat PIDJ		1.815.686	-	165.062	165.062	165.062	165.062	165.062	165.062	165.062	165.062	165.062	165.062	165.062	1.815.686
5234.DBA.002	Internsip Dokter Gigi (SDM-22)	1200 Orang	55.643.072	-	6.444.625	3.750.275	3.959.075	6.433.425	3.879.625	5.352.850	6.433.425	3.938.275	5.273.400	6.433.425	3.744.675	55.643.072
051	Penyusunan Kebijakan Internsip Dokter Gigi		16.800	-	11.200	5.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.800
052	Penilaian Wahana		428.800	-	-	-	214.400	-	-	214.400	-	-	-	-	-	428.800
053	Pelatihan Dokter Gigi Pendamping Internsip		2.787.550	-	-	-	-	-	-	1.393.775	-	-	1.393.775	-	-	2.787.550
054	Pembekalan Peserta Dokter Gigi Internsip		6.421.400	-	1.605.350	-	-	1.605.350	-	-	1.605.350	-	-	1.605.350	-	6.421.400
055	Pelaksanaan Internsip Dokter Gigi		45.065.986	-	4.786.344	3.702.944	3.702.944	4.786.344	3.702.944	3.702.944	4.786.344	3.702.944	3.702.944	4.786.344	3.702.944	45.065.986
056	Pendampingan Implementasi Pelaksanaan Internsip Dokter Gigi		269.900	-	-	-	-	-	134.950	-	-	-	134.950	-	-	269.900
057	Dukungan KIKI pada Pelaksanaan Internsip Dokter Gigi		193.600	-	-	-	-	-	-	-	-	193.600	-	-	-	193.600
058	Dukungan Tata Laksana Sekretariat PIDGI		459.036	-	41.731	41.731	41.731	41.731	41.731	41.731	41.731	41.731	41.731	41.731	41.731	459.036
Timja 4		31.229.430	677.990	778.648	903.348	886.808	3.551.868	2.428.618	2.366.658	2.483.418	2.436.058	2.548.388	3.367.918	8.799.710	31.229.430	
6812.BAA.001	Pendayagunaan SDM Indonesia Ke Luar Negeri (SDM-22)	720 Orang	3.092.660	15.500	64.508	127.248	178.668	1.130.588	141.518	147.518	191.318	149.958	117.748	119.598	708.490	3.092.660
051	Penyusunan Kebijakan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan ke Luar Negeri		295.400	-	4.000	4.000	39.650	39.650	39.650	39.650	-	39.650	39.650	41.500	8.000	295.400
054	Fasilitasi Implementasi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan ke Luar Negeri		2.488.610	10.000	52.508	95.098	110.868	1.027.138	77.718	77.718	167.168	86.158	53.948	53.948	676.340	2.488.610
055	Pemanfaatan Returnee dalam Sharing Experiences Peningkatan Karir ke LN kepada Lulusan Poltekkes		249.500	-	8.000	24.150	24.150	24.150	24.150	24.150	24.150	24.150	24.150	24.150	24.150	249.500
058	WHO Global Code of Practise on the International Recruitment of Health Personnels		59.150	5.500	-	4.000	4.000	39.650	-	6.000	-	-	-	-	-	59.150
6812.FBA.001	Fasilitasi Dan Pembinaan Daerah	1 Daerah	1.350.800	-	6.000	72.960	-	72.960	72.960	-	72.960	72.960	-	980.000	-	1.350.800
051	Fasilitasi dan Pembinaan Wilayah		1.350.800	-	6.000	72.960	-	72.960	72.960	-	72.960	72.960	-	980.000	-	1.350.800
6812.QAA.007	Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Wni Lulusan Luar Negeri (SDM-22)	72 Orang	26.785.970	662.490	708.140	703.140	708.140	2.348.320	2.214.140	2.219.140	2.219.140	2.213.140	2.430.640	2.268.320	8.091.220	26.785.970
052	Dukungan Program Adaptasi Dokter Spesialis WNI LLN		1.807.240	150.570	150.570	150.570	150.570	150.570	150.570	150.570	150.570	150.570	150.570	150.570	150.570	1.807.240
053	Pengelolaan Program Adaptasi Dokter Spesialis WNI LLN		24.476.200	470.670	516.320	511.320	516.320	2.156.500	2.022.320	2.027.320	2.027.320	2.021.320	2.238.820	2.027.320	7.940.650	24.476.200
054	Pendampingan Teknis Pelaksanaan Program Adaptasi Dokter Spesialis WNI LLN		502.530	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250	90.030	-	502.530
Timja 5		5.039.546	279.340	675.800	1.013.678	296.788	505.408	303.513	742.114	515.295	169.612	360.750	173.250	4.000	5.039.546	
6812.ABG.001	Kebijakan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang/Pendukung WNA dan WNI LLN (SDM-22)	2 Rekomendasi Kebijakan	307.550	-	124.950	170.600	12.000	-	-	-	-	-	-	-	-	307.550
051	Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Pendayagunaan TKWNA		172.600	-	83.300	83.300	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	172.600
052	Penyusunan Daftar Jabatan yang dapat Diduduki Tenaga Kerja Asing untuk Kategori Kesehatan		134.950	-	41.650	87.300	6.000	-	-	-	-	-	-	-	-	134.950
6812.BAA.002	Pendayagunaan Sdmk Warga Negara Asing (SDM-22)	75 Orang	1.548.410	157.950	179.650	209.588	201.588	184.263	161.263	118.938	110.950	149.572	39.650	31.000	4.000	1.548.410
051	Advokasi Pendayagunaan SDMk WNA di wilayah KEK		233.950	130.950	45.000	29.000	29.000	-	-	-	-	-	-	-	-	233.950

RO/ Komponen		Target RO	Alokasi 2024	RPD 2024												
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah
052	Pendampingan Teknis Pendayagunaan SDM K WNA sesuai area kegiatan		713.560	-	-	117.938	109.938	91.938	91.938	91.938	75.300	122.572	4.000	4.000	4.000	713.560
053	Refleksi Implementasi Pendayagunaan TK WNA dan WNI LLN		600.900	27.000	134.650	62.650	62.650	92.325	69.325	27.000	35.650	27.000	35.650	27.000	-	600.900
6812.BAA.004	Pendayagunaan Residen Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU)	72 Orang	3.183.586	121.390	371.200	633.490	83.200	321.145	142.250	623.176	404.345	20.040	321.100	142.250	-	3.183.586
051	Rekrutmen dan Seleksi		3.183.586	121.390	371.200	633.490	83.200	321.145	142.250	623.176	404.345	20.040	321.100	142.250	-	3.183.586
Total			795.362.974	1.537.509	76.637.614	65.461.925	66.592.387	77.655.779	68.833.407	69.196.130	74.836.542	67.891.949	66.489.095	85.930.493	74.300.143	795.362.974

KEGIATAN	RPK TAHUN 2024											
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
Tim Kerja 1												
Pembahasan RPKM Tugsus Named & Nakes												
Penyiapan lokus												
Rekrutmen dan seleksi												
Pengumuman hasil seleksi												
Penetapan hasil seleksi												
Pembekalan												
Pemberangkatan peserta												
Pemulangan peserta yg telah selesai tugas												
Tim Kerja 2												
Pengusulan kebutuhan dokter spesialis oleh RS via website												
Verifikasi usulan kebutuhan dokter spesialis oleh Dinkes Kab/Kota, Dinkes Prov												
Pengumuman dan pemilihan lokasi penempatan PGDS												
Pembekalan PGDS												
Penempatan PGDS												
Pemulangan PGDS												
Penempatan Residen												
Pemulangan Residen												
Penyiapan lokasi penempatan PGDS												
Advokasi Stakeholder untuk Peningkatan Kepesertaan Lulusan Dokter Spesialis												
Tim Kerja 3												
Penyusunan kebijakan PIDJ												
Rekrutmen Internsip												
Pembekalan Internsip												
Pemberangkatan Internsip												
Evaluasi pelaksanaan internsip												
Pemulangan Internsip												
Penilaian wahana												
Pelatihan dokter pendamping												
Workshop program internsip dan raker KIKI												
Penyusunan Kebijakan Internsip Dokter Gigi												

KEGIATAN	RPK TAHUN 2024											
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
Penilaian Wahana												
Pelatihan Dokter Gigi Pendamping Internsip												
Pembekalan Peserta Dokter Gigi Internsip												
Pelaksanaan Internsip Dokter Gigi												
Pendampingan Implementasi Pelaksanaan Internsip Dokter Gigi												
Dukungan KIKI pada Pelaksanaan Internsip Dokter Gigi												
Dukungan Tata Laksana Sekretariat PIDGI												
Tim Kerja 4												
Penyusunan Kebijakan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan ke Luar Negeri												
Fasilitasi Implementasi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan ke Luar Negeri												
Pemanfaatan Returnee dalam Sharing Experince Peningkatan Karir ke LN kepada Lulusan Poltekkes												
WHO Global Code of Practise on the International Recruitment of Health Personnels												
Fasilitasi dan Pembinaan Wilayah												
Dukungan Program Adaptasi Dokter Spesialis WNI LLN												
Pengelolaan Program Adaptasi Dokter Spesialis WNI LLN												
Pendampingan Teknis Pelaksanaan Program Adaptasi Dokter Spesialis WNI LLN												
Tim Kerja 5												
Kebijakan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang/Pendukung WNA dan WNI LLN (SDM-22)												
Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Pendayagunaan TKWNA												
Penyusunan Daftar Jabatan yang dapat Diduduki Tenaga Kerja Asing untuk Kategori Kesehatan/Rekognisi												
Pendayagunaan Sdmk Warga Negara Asing (SDM-22)												
Advokasi Pendayagunaan SDM K WNA di wilayah KEK												

KEGIATAN	RPK TAHUN 2024											
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
revisi PMK 6 th 2023 tentang Pendayagunaan TKWNA												
Pendampingan Teknis Pendayagunaan SDM K WNA sesuai area kegiatan												
Refleksi Implementasi Pendayagunaan TK WNA dan WNI LLN												
Pendayagunaan Residen Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSP-PU)												
Rekrutmen dan Seleksi												
Pendayagunaan Residen di RSPPU (Dalam Kota dan Luar Kota)												